

MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN

DI PEMATANGSIANTAR 1945–1949



**Prof. Dr. Hisarma Saragih, M.Hum.
Jalatua H. Hasugian, M.H., M.A.**

KRM
INDONESIA

MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN **Di Pematangsiantar** **—1945-1949—**

Prof. Dr. Hisarma Saragih, M.Hum.
Jalatus H. Hasugian, M.H., M.A.



PENERBIT KBM INDONESIA

adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku-buku penulis di tanah air Indonesia, serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN DI PEMATANGSIANTAR 1945-1949

Copyright @ 2026 Prof. Dr. Hisarma Saragih, M.Hum. &
Jalatus H. Hasugian, M.H., M.A.

All right reserved

Penulis

Prof. Dr. Hisarma Saragih, M.Hum.
Jalatus H. Hasugian, M.H., M.A.

Keterangan Foto :

Gedung peninggalan era Kolonial Belanda (International Simeloengoen Club) yang pernah jadi
Markas TRI dan sekarang dikenal sebagai Gedung Juang 45 terletak di Jalan Merdeka
Pematangsiantar (foto/dok penulis)

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Ika Puji A.

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruahey, Drs., M.Sc.
Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)
Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia
Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021
081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>
www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

[@penerbit.kbmindonesia](https://www.instagram.com/penerbit.kbmindonesia)
[@penerbitbukujogja](https://www.instagram.com/penerbitbukujogja)

ISBN: 978-634-278-246-0

Cetakan ke-1, Maret 2026
14,8 x 21 cm, xviii + 293 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-
Kemenkumham dan isi buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

- i. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
- ii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
- iii. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
- iv. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah)

Kata Pengantar

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku sejarah “Masa Revolusi Kemerdekaan di Pematangsiantar 1945–1949” ini akhirnya dapat diselesaikan. Kehadiran buku ini merupakan hasil dari proses panjang penelitian, refleksi akademik, serta upaya memahami kembali dinamika sejarah lokal sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah nasional Indonesia.

Selama ini, narasi besar Revolusi Kemerdekaan Indonesia lebih banyak berpusat pada peristiwa-peristiwa di tingkat nasional, terutama yang berlangsung di kota-kota besar dan pusat pemerintahan. Padahal, kemerdekaan Indonesia sesungguhnya lahir dan dipertahankan melalui perjuangan kolektif yang berlangsung di berbagai daerah. Kota-kota lokal menjadi ruang konkret tempat revolusi diuji, dijalankan, dan dipertahankan dalam situasi yang sering kali penuh ketidakpastian.

Pematangsiantar merupakan salah satu kota yang memiliki posisi strategis dalam dinamika tersebut. Kota ini tidak sekadar menjadi latar peristiwa sejarah, tetapi menjadi arena pertemuan antara runtuhnya kekuasaan kolonial, munculnya legitimasi republik, serta terbentuknya kesadaran politik masyarakat lokal. Revolusi di Pematangsiantar memperlihatkan bahwa kemerdekaan bukanlah peristiwa tunggal yang selesai pada saat proklamasi, melainkan proses sosial-politik yang terus berlangsung melalui tindakan nyata masyarakat.

Penelitian yang menjadi dasar buku ini berupaya merekonstruksi dinamika tersebut melalui pendekatan sejarah kritis. Berbagai sumber digunakan, mulai dari arsip kolonial, dokumen sezaman, pemberitaan pers, hingga interpretasi historiografis yang

memungkinkan pembacaan ulang terhadap peristiwa revolusi di tingkat lokal. Pendekatan ini penting untuk memperlihatkan bahwa sejarah tidak hanya dibangun oleh narasi resmi, tetapi juga oleh pengalaman sosial masyarakat yang sering kali terpinggirkan dari sejarah arus utama.

Penulis melihat bahwa Revolusi Kemerdekaan di Pematangsiantar memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar konflik politik dan militer. Ia merupakan proses transformasi sosial yang mengubah relasi kekuasaan, identitas masyarakat, serta cara pandang terhadap negara dan kebangsaan. Dalam situasi kekosongan kekuasaan pasca pendudukan Jepang, masyarakat lokal tidak menunggu hadirnya struktur negara secara sempurna, tetapi secara aktif menciptakan legitimasi baru melalui tindakan kolektif, simbolik, dan politis.

Buku ini juga merupakan bagian dari upaya memperkuat kajian sejarah lokal sebagai fondasi penting historiografi nasional. Sejarah Indonesia tidak dapat dipahami secara utuh tanpa melihat bagaimana daerah-daerah berperan dalam membentuk dan mempertahankan negara. Melalui perspektif mikro-historis, kita dapat melihat bahwa kekuatan Republik Indonesia pada masa revolusi justru terletak pada ketahanan sosial masyarakat di tingkat lokal. Dalam proses penulisan, penulis menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan sumber serta fragmentasi data sejarah yang tersebar di berbagai arsip.

Namun, keterbatasan tersebut sekaligus menjadi dorongan untuk melakukan pembacaan kritis terhadap sumber-sumber yang ada dan membuka kemungkinan interpretasi baru terhadap sejarah revolusi di Sumatra Timur, khususnya Pematangsiantar.

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan akademik maupun moral selama proses penelitian dan penulisan buku ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Universitas Simalungun sebagai ruang intelektual yang mendorong berkembangnya penelitian sejarah lokal dan penguatan tradisi akademik di wilayah Sumatra Utara.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini masih jauh dari sempurna dan memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi pengembangan penelitian sejarah di masa mendatang. Harapan penulis, karya ini dapat menjadi pijakan awal bagi penelitian lanjutan, memperkaya diskursus akademik, serta menjadi bahan pembelajaran bagi generasi muda dalam memahami makna perjuangan kemerdekaan secara lebih kontekstual.

Akhirnya, penulis berharap buku ini tidak hanya dibaca sebagai rekaman masa lalu, tetapi juga sebagai refleksi mengenai bagaimana bangsa Indonesia dibangun melalui perjuangan kolektif di berbagai ruang lokal. Dari kota-kota seperti Pematangsiantar, kita dapat memahami bahwa kemerdekaan adalah hasil keberanian, solidaritas, dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan sejarah yang besar.

Pematangsiantar, Maret 2026

Penulis,

**Prof. Dr. Hisarma Saragih, M.Hum.
Jalatua H. Hasugian, M.H., M.A.**

Kata Sambutan

Rektor Universitas Simalungun

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya buku sejarah berjudul: ***“Masa Revolusi Kemerdekaan di Pematangsiantar 1945–1949”***. Kehadiran karya tulis ilmiah ini merupakan kontribusi akademik yang penting dalam memperkaya khazanah historiografi Indonesia, khususnya dalam pengembangan kajian sejarah lokal yang selama ini belum memperoleh perhatian yang memadai.

Kami selaku Rektor Universitas Simalungun memandang bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab tidak hanya sebagai pusat pendidikan dan pengajaran, tetapi juga sebagai institusi yang berperan dalam pelestarian memori kolektif masyarakat. Penelitian sejarah lokal menjadi bagian penting dari upaya tersebut, karena melalui kajian sejarah daerah, identitas sosial dan kebangsaan dapat dipahami secara lebih mendalam dan kontekstual.

Buku ini menunjukkan bahwa Revolusi Kemerdekaan Indonesia merupakan proses historis yang berlangsung secara luas dan polisentris. Kemerdekaan tidak hanya diperjuangkan oleh tokoh-tokoh nasional di pusat pemerintahan, tetapi juga oleh masyarakat di berbagai daerah yang menghadapi situasi revolusi dengan dinamika dan tantangannya masing-masing. Pematangsiantar menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat lokal berperan aktif dalam mempertahankan legitimasi Republik Indonesia pada masa-masa awal berdirinya negara.

Melalui pendekatan akademik sebagai agen perubahan yang berjalan sistematis serta penggunaan sumber sejarah yang beragam, buku ini menghadirkan rekonstruksi sejarah yang tidak hanya bersifat naratif, tetapi juga analitis. Pembaca diajak memahami revolusi

sebagai proses sosial-politik yang kompleks, melibatkan perubahan struktur kekuasaan, produksi simbol politik, serta ketahanan masyarakat dalam menghadapi krisis nasional.

Sebagai institusi pendidikan tinggi yang berada di wilayah yang juga memiliki Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Simalungun mendorong lahirnya karya-karya ilmiah yang berakar pada realitas lokal namun memiliki relevansi nasional. Penelitian seperti yang dituangkan dalam buku ini memperlihatkan bagaimana kajian akademik dapat berkontribusi pada penguatan identitas daerah sekaligus memperluas pemahaman tentang sejarah Indonesia secara keseluruhan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi penting bagi mahasiswa, dosen, peneliti, guru sejarah, serta masyarakat umum. Lebih dari itu, karya ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran sejarah di kalangan generasi muda, bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bersama dari berbagai daerah dan lapisan masyarakat.

Terbitnya buku ini juga menjadi bukti bahwa tradisi akademik di lingkungan Universitas Simalungun terus berkembang melalui penelitian yang serius dan berbasis ilmiah. Oleh karena itu, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada para penulis atas dedikasi dan komitmen akademik yang telah menghasilkan karya bermutu ini.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan sejarah, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan. Semoga karya ini menjadi inspirasi bagi lahirnya penelitian-penelitian sejarah lainnya yang mengangkat kekayaan pengalaman lokal sebagai bagian dari perjalanan bangsa Indonesia.

Pematangsiantar, Maret 2026

Rektor Universitas Simalungun
Prof. Dr. Sarintan Efratani Damanik, M.Si.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Kata Sambutan Rektor Universitas Simalungun.....	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Revolusi Kemerdekaan sebagai Peristiwa Historis.....	1
1.2. Jejak dan Sumber Sejarah	7
1.3. Pematangsiantar sebagai Subjek Sejarah	8
1.4. Perspektif Sejarah Politik dalam Konteks Lokal	10
1.5. Interpretasi, Historiografi dan Alur Pembahasan	13
BAB II PENDUDUKAN JEPANG DI SUMATRA TIMUR DAN	
PEMATANGSIANTAR (1942–1945).....	17
2.1. Masuknya Jepang ke Sumatra Timur dan Penguasaan	
Pematangsiantar	17
2.2. Pelayaran Menuju Pantai Timur dan Antisipasi Perlawanan	
Belanda	20
2.3. Pasukan Jepang Memasuki Kota Pematangsiantar	21
2.4. Pendudukan Jepang dan Penghapusan Pemerintahan Sipil	
Kolonial	23
2.5. Dampak Ekonomi Perang Jepang terhadap Kehidupan Kota	
Pematangsiantar	29
2.6. Kontrol Sosial, Kerja Paksa, dan Militerisasi Kehidupan	
Masyarakat Kota.....	32

2.7. Pendidikan, Budaya, dan Propaganda: Pembentukan Mentalitas Masyarakat.....	35
2.8. Akhir Pendudukan Jepang dan Transisi Kekuasaan Menuju 1945	37
BAB III MASUKNYA BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN KE SUMATRA TIMUR - PEMATANGSIANTAR.....	47
3.1. Kondisi Politik dan Struktur Komunikasi Sumatra Timur Menjelang Proklamasi Kemerdekaan 1945	47
3.2. Kekosongan Kekuasaan dan Krisis Informasi Pasca-Penyerahan Jepang	54
3.3. Medan sebagai Pusat Awal Transmisi dan Legitimasi Proklamasi di Sumatra	57
3.4. Jalur Penyebaran Berita Proklamasi Ke Pedalaman Sumatra Timur	61
3.5. Pematangsiantar sebagai Kota Administratif dalam Masa Transisi Revolusioner	65
3.6. Dari Berita Ke Aksi: Simbol, Ketegangan, dan Awal Revolusi di Sumatra Timur–Pematangsiantar	68
BAB IV PENGIBARAN SANG MERAH PUTIH PERTAMA DAN PERISTIWA SIANTAR HOTEL.....	73
4.1 Pengibaran Sang Merah Putih Pertama di Pematangsiantar: Awal Simbolik Revolusi Lokal	73
4.2 Pematangsiantar sebagai Wilayah Strategis di Sumatra Timur	78
4.3. Pendudukan Jepang dan Transformasi Kekuasaan di Pematangsiantar	80
4.4 Dampak Kekalahan Jepang, Pematangsiantar Jadi Arena Konfrontasi Simbolik.....	81
4.5 Siantar Hotel sebagai Basis NICA dan Jaringan Kolonial	83
4.6. Aktivitas Komando Belanda dan Provokasi Terencana	87
4.7. Kronologi Peristiwa Siantar Hotel 15 Oktober 1945	93

4.8. Peristiwa Siantar Hotel dalam Perspektif Pers Indonesia dan Belanda: Pertarungan Narasi dan Makna.....	101
4.9 Dampak Strategis Peristiwa Siantar Hotel terhadap Revolusi Kemerdekaan di Sumatra Timur	104
BAB V REVOLUSI KEMERDEKAAN DAN PEMINDAHAN	
PUSAT PEMERINTAHAN SUMATRA	
KE PEMATANGSIANTAR	111
5.1. Akhir Perang Dunia II, Kekalahan Jepang dan Kekosongan Kekuasaan di Indonesia	111
5.2. Perang Regional Sumatra Timur, Arus Pengungsi ke Pematangsiantar dan Revolusi Sosial	118
5.3. Revolusi Sosial di Sumatra Timur dan Pengaruhnya di Pematangsiantar	134
5.4. Pematangsiantar dalam Jaringan Medan Area–Aceh: Logistik, Mobilisasi, dan Komunikasi	142
5.5. Pencetakan Oeang Republik Indonesia Daerah di Pematangsiantar	148
5.6. Pematangsiantar sebagai Pusat Pemerintahan Sumatra	154
5.7. Wakil Presiden di Pematangsiantar dan Hari-Hari Terakhir Ibukota Sumatra.....	165
5.8. Jatuhnya Pematangsiantar, Transformasi Perjuangan Republik, dan Pergeseran Pusat Negara ke Bukittinggi	167
BAB VI AGRESI MILITER BELANDA, NEGARA SUMATRA	
TIMUR DAN DINAMIKA POLITIK DI	
PEMATANGSIANTAR.....	171
6.1. Situasi Politik dan Militer di Sumatra Timur Pasca Perjanjian Linggarjati.....	171
6.2. Pematangsiantar dalam Struktur Pemerintahan Republik di Sumatra	174
6.3. Perencanaan dan Persiapan Agresi Militer Belanda I	175
6.4. Evakuasi Pimpinan Negara dan Implikasinya bagi Sumatra Timur	188
6.5. Mobilisasi Massa dan Legitimasi Negara Sumatra Timur	194
6.6. Kunjungan Perdana Menteri Belanda ke Pematangsiantar ...	198

6.7. Eskalasi Konflik dan Perubahan Strategi Belanda.....	203
6.8. Posisi Pematangsiantar dalam Sejarah Revolusi Kemerdekaan Indonesia.....	213
BAB VII AKHIR REVOLUSI KEMERDEKAAN DAN	
DAMPAKNYA TERHADAP PEMATANGSIANTAR.....	215
7.1. Dampak Agresi Militer Belanda II Terhadap Republik Indonesia.....	215
7.2. Sumatra Timur dalam Tekanan Militer dan Politik Belanda.....	223
7.3. Tekanan Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Perubahan Konstelasi Global.....	232
7.4. Diplomasi sebagai Jalan Keluar: Perjanjian Roem–Royen dalam Dinamika Revolusi Akhir.....	235
7.5. KMB sebagai Arena Pertarungan Indonesia, Belanda, dan Internasional	239
7.6. Dampak Keputusan KMB bagi Daerah Republik Indonesia	248
7.7. Agresi Militer Belanda II sebagai Titik Balik Kemenangan Republik Indonesia	249
7.8. Pematangsiantar dalam Kerangka Kemenangan Republik ...	251
7.9. Akhir Revolusi di Pematangsiantar, Perjuangan dalam Memori Nasional.....	252
BAB VIII PUSARAN REVOLUSI KEMERDEKAAN DI	
PEMATANGSIANTAR DALAM PANDANGAN PERS	
KOLONIAL BELANDA (1942–1947)	257
8.1. Pers Kolonial sebagai Sumber dan Medan Wacana	257
8.2. Peran Jepang dalam Masa Transisi Kekuasaan	262
8.3. Medan Area, Eskalasi Konflik Bersenjata, dan Posisi Strategis Pematangsiantar	265
8.4. Pematangsiantar dalam Bingkai Legitimasi Operasi Militer	267
8.5. Pematangsiantar sebagai Simbol Teror Republik.....	270
8.6. Operasi Militer Belanda, Aksi Pembersihan, dan Klaim Pemulihan Ketertiban di Pematangsiantar	271
8.7. Pematangsiantar sebagai Etalase Kemiskinan Pasca-Perang	275
8.8. Pematangsiantar sebagai Medan Konflik, Trauma, dan Produksi Wacana Kolonial.....	277

BAB IX PENUTUP	279
DAFTAR PUSTAKA	285
Tentang Penulis	291

Daftar Gambar

Gambar 1	Pendaratan Tentara Jepang di Tanjung Tiram, Batubara (1942)	18
Gambar 2	Peta Pergerakan Militer Jepang di Sumatra (1942)	19
Gambar 3	Bangunan Muziektent di Esplanade (Lapangan Merdeka)	76
Gambar 4	Prasasti Pengibaran Merah Putih Pertama di Pematangsiantar (1996).....	77
Gambar 5	Monumen Pengibaran Merah Putih di Lapangan Merdeka (Renovasi 2021)	78
Gambar 6	Monumen Perjuangan Kemerdekaan di Lapangan Merdeka	79
Gambar 7	Siantar Hotel pada Era Kolonial Belanda	81
Gambar 8	Drainase Ruang Bawah Tanah Siantar Hotel.....	85
Gambar 9	Ventilasi Bawah Tanah (Mulu Cave) Siantar Hotel	86
Gambar 10	Ruang Penyimpanan Minuman di Bawah Tanah Siantar Hotel	86
Gambar 11	Saluran Air Bawah Jembatan menuju Pabrik Es Pematang.....	87
Gambar 12	Tampak Depan Siantar Hotel dan Tugu Seberang Lobi.....	89
Gambar 13	Simeloengoen Club, Pematangsiantar (1934).....	91
Gambar 14	Inskripsi Tugu Peristiwa Siantar Hotel	95
Gambar 15	Gedung International Simeloengoen Club (1913)	123
Gambar 16	Tugu Peringatan Revolusi Fisik di Gedung Juang 45	124
Gambar 17	Kantor Pos Pematangsiantar (1913)	127
Gambar 18	Stasiun Kereta Api Pematangsiantar (1915)	127
Gambar 19	Kantor Telepon Pematangsiantar (1922)	128
Gambar 20	Gedung Javasche Bank Pematangsiantar (1923)	149
Gambar 21	Gedung PMI Pematangsiantar sebelum Renovasi	151
Gambar 22	Gemeentenhuis Pematangsiantar (Balai Kota)	158

Gambar 23	Inskripsi Pintu Masuk Balai Kota Pematangsiantar....	159
Gambar 24	Gedung Balai Kota Pematangsiantar (Kondisi Kini)..	160
Gambar 25	Teuku Mohammad Hasan dan Sutan Mohammad Amin Nasution	161
Gambar 26	Wakil Presiden Mohammad Hatta	165
Gambar 27	Kendaraan Lapis Baja Memasuki Pematangsiantar (1948).....	176
Gambar 28	Aksi Massa di Sumatra Timur saat Kunjungan Tengku Mansur (1946).....	196
Gambar 29	Garda Sipil Pematangsiantar dalam Demonstrasi (1947).....	197
Gambar 30	Kunjungan Perdana Menteri Belanda Beel ke Sumatra (1947).....	199
Gambar 31	Penandatanganan Perjanjian Roem–Royen (1949)....	236
Gambar 32	Konferensi Meja Bundar di Den Haag (1949).....	240
Gambar 33	Mohammad Hatta Menandatangani Hasil KMB	244

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Revolusi Kemerdekaan sebagai Peristiwa Historis

Revolusi Kemerdekaan Indonesia 1945–1949 merupakan sebuah peristiwa yang terjadi secara serentak dan seragam di seluruh wilayah bekas Hindia Belanda atau Indonesia. Peristiwa ini adalah suatu proses historis yang berlangsung melalui krisis kekuasaan, kekosongan otoritas, konflik bersenjata, dan pertarungan legitimasi antara berbagai kekuatan politik dan sosial.

Dalam perspektif ilmu sejarah, revolusi harus dipahami sebagai perubahan struktural dalam tatanan kekuasaan dan hubungan sosial, bukan sekadar pergantian rezim atau deklarasi politik semata. Kuntowijoyo menegaskan bahwa sejarah tidak boleh direduksi menjadi kronik peristiwa, tetapi harus dipahami sebagai proses sosial yang bergerak dalam dimensi waktu, ruang, dan struktur kekuasaan¹.

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan titik simbolik lahirnya Negara Republik Indonesia, meski secara historis ia hanyalah awal dari perjuangan panjang untuk menjadikan kemerdekaan itu dalam konteks nyata. Di banyak wilayah, termasuk di Sumatra Timur-Pematangsiantar, kemerdekaan tidak datang sebagai fakta yang diterima, melainkan sebagai klaim yang harus dipertahankan dengan kekuatan politik, militer, dan dukungan rakyat. Dalam pengertian Renier, sejarah adalah “kisah yang harus diceritakan” tentang pengalaman manusia kolektif, dan revolusi adalah momen ketika

¹ Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005, hlm. 15–18

kisah itu dipenuhi oleh ketegangan antara masa lalu kolonial dan masa depan yang belum pasti².

Di dalam revolusi, struktur lama belum sepenuhnya runtuh, sementara struktur baru belum sepenuhnya terbentuk. Hal inilah yang melahirkan situasi *liminal*, artinya: ruang ketidakpastian di mana berbagai kekuatan bersaing untuk mendefinisikan siapa yang berhak memerintah dan atas dasar apa. Kekuasaan kolonial Belanda telah runtuh pada 1942, digantikan oleh pendudukan Jepang, dan pada Agustus 1945 kekuasaan Jepang pun roboh. Namun kekosongan ini tidak otomatis diisi oleh Republik. Sebab wilayah Republik masih menjadi arena konflik antara Republik, kekuatan kolonial Belanda yang kembali, tentara Sekutu, dan berbagai kelompok lokal. Kuntowijoyo menyebut fase semacam ini sebagai periode “krisis struktur”, ketika legitimasi politik diperebutkan oleh banyak aktor³.

Dengan demikian, Revolusi Kemerdekaan Indonesia harus dibaca sebagai rangkaian konflik lokal yang saling terhubung oleh satu proyek nasional: pendirian negara Indonesia yang berdaulat. Tanpa memahami bagaimana revolusi dijalani di kota-kota, desa-desa, dan wilayah-wilayah tertentu, sejarah kemerdekaan akan tereduksi menjadi narasi elite yang kehilangan pijakan sosialnya⁴.

1.1.1. Revolusi dalam Perspektif Historiografi Lokal

Historiografi Indonesia selama beberapa dekade, kerap kali dibangun di atas paradigma negara-sentris, di mana Jakarta, Yogyakarta, dan elite nasional menjadi pusat narasi historisnya. Dalam paradigma ini, revolusi digambarkan sebagai rangkaian keputusan politik, perjanjian internasional, dan strategi diplomasi. Pendekatan semacam ini penting, tetapi ia mengabaikan dimensi lokal dari revolusi: bagaimana kemerdekaan dihidupi, dipertahankan, dan dipertaruhkan oleh masyarakat di daerah. Kuntowijoyo mengkritik

² G.J. Renier. *History: Its Purpose and Method*. London: George Allen & Unwin, 1950, hlm.13-16.

³ Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hlm. 35-38.

⁴ Renier, hlm.15-18

historiografi yang hanya berfokus pada elite karena berpotensi memisahkan sejarah dari pengalaman sosial rakyat⁵.

Apalagi, sejarah modern menuntut pendekatan yang lebih multidimensional. Revolusi bukan hanya peristiwa politik, tetapi juga peristiwa sosial dan kultural. Ia melibatkan perubahan dalam struktur kepemilikan, relasi etnis, legitimasi kekuasaan, dan bahkan dalam cara masyarakat memandang dirinya sendiri. Dalam perspektif ini, kota-kota seperti Pematangsiantar menjadi sangat penting karena di sanalah perubahan-perubahan ini dapat diamati secara konkret⁶.

Renier menekankan bahwa sejarah dibangun dari “*traces*” atau jejak-jejak masa lalu yang ditinggalkan dalam dokumen, ingatan, dan artefak. Sejarahawan tidak merekam masa lalu secara langsung, melainkan merekonstruksinya dari jejak-jejak tersebut. Dalam konteks revolusi, jejak itu berupa arsip militer, laporan pemerintah, surat kabar, serta kesaksian para pelaku dan saksi⁷. Oleh karena itu, menulis sejarah Pematangsiantar dalam revolusi bukanlah menambahkan satu episode kecil ke dalam narasi besar, melainkan membuka kembali cara kita memahami revolusi itu sendiri: sebagai proses yang berakar dalam pengalaman lokal.⁸

Sejarah lokal bukanlah sejarah kecil atau pinggiran. Dalam metodologi sejarah modern, justru melalui sejarah lokal kita dapat memahami bagaimana struktur nasional bekerja di tingkat konkret. Miftahuddin menegaskan bahwa sejarah lokal memungkinkan sejarahawan melihat hubungan antara negara, masyarakat, dan kekuasaan dalam skala yang lebih nyata dan terukur⁹.

Revolusi di Pematangsiantar adalah contoh bagaimana kemerdekaan tidak jatuh dari langit, melainkan dibangun melalui konflik, perlawanan, dan kompromi. Di kota ini, kekuasaan kolonial dan kekuasaan republik saling bertabrakan dalam ruang yang sama:

⁵ Kuntowijoyo. 2005, hlm.52-55

⁶ Kuntowijoyo. 2005, hlm.52-55

⁷ Renier, hlm.79-84

⁸ Renier, hlm.79-84

⁹ Miftahuddin. *Metodologi Penelitian Sejarah Lokal*. Yogyakarta: Ombak, 2019, hlm.3-7

kantor pemerintahan, stasiun kereta, hotel, barak, dan jalan-jalan kota. Setiap ruang menjadi medan politik. Dengan menempatkan Pematangsiantar sebagai subjek sejarah, bukan sekadar latar, buku ini mengikuti prinsip sejarah lokal sebagai pendekatan epistemologis: bahwa kebenaran sejarah nasional hanya dapat dipahami jika kita mengurai pengalaman daerah-daerah yang membentuknya¹⁰.

1.1.2. Sumatra Timur dan Pematangsiantar dalam Struktur Kekuasaan Kolonial

Untuk memahami Pematangsiantar pada masa revolusi, perlu terlebih dahulu dipahami posisi Sumatra Timur dalam struktur kolonial. Wilayah ini merupakan salah satu pusat ekonomi perkebunan terpenting di Hindia Belanda, dengan jaringan perusahaan Eropa, administrasi kolonial, dan infrastruktur modern. Kota-kota seperti Medan dan Pematangsiantar berfungsi sebagai pusat administratif dan logistik bagi sistem ini. Kuntowijoyo menjelaskan bahwa kota kolonial adalah simpul kekuasaan yang menghubungkan ekonomi, politik, dan militer¹¹.

Ketika Jepang menyerah pada 1945, struktur kolonial ini runtuh, tetapi tidak menghilang. Bangunan, arsip, jaringan transportasi, dan elite lokal tetap ada. Revolusi di Sumatra Timur terjadi di atas sisa-sisa struktur kolonial ini, menjadikannya arena konflik yang sangat tajam. Di sinilah Pematangsiantar tampil sebagai ruang strategis, baik bagi Republik maupun bagi Belanda yang ingin kembali¹².

Dalam perspektif sejarah politik dan kota, sebuah kota bukanlah sekadar kumpulan bangunan, melainkan ruang di mana kekuasaan dijalankan, dinegosiasikan, dan dipertentangkan. Kuntowijoyo menegaskan bahwa kota dalam sejarah modern berfungsi sebagai

¹⁰ Miftahuddin, hlm.3-7

¹¹ Kuntowijoyo. 2005, hlm.60-63

¹² Kuntowijoyo. 2005, hlm.60-63

pusat administratif dan simbol kedaulatan; siapa yang menguasai kota berarti menguasai legitimasi politik atas wilayah di sekitarnya¹³.

Pematangsiantar dalam konteks Sumatra Timur memiliki fungsi semacam itu. Sejak masa kolonial Belanda, kota ini menjadi pusat pemerintahan lokal, sekaligus simpul komunikasi antara wilayah perkebunan, kawasan pedalaman Simalungun, dan jalur transportasi ke Medan dan pelabuhan-pelabuhan Pantai Timur. Dalam sistem kolonial, kota ini menjadi titik di mana administrasi, keamanan, dan ekonomi saling terhubung. Ketika struktur kolonial runtuh pada 1945, ruang ini tidak menjadi kosong, melainkan segera diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan yang bersaing¹⁴.

Revolusi menjadikan kota sebagai arena strategis. Kantor residen, markas militer, stasiun kereta api, dan hotel-hotel menjadi simbol kekuasaan. Peristiwa seperti pengibaran bendera Merah Putih, perebutan senjata, dan konflik fisik di ruang-ruang kota merupakan ekspresi dari pertarungan legitimasi antara Republik dan kekuatan kolonial yang hendak kembali berkuasa. Dengan demikian, Pematangsiantar tidak dapat dipahami hanya sebagai lokasi geografis, melainkan sebagai medan politik. Kota ini menjadi simbol keberadaan Republik di Sumatra Timur dan sekaligus target utama upaya rekolonisasi Belanda.

Salah satu ciri utama revolusi adalah runtuhnya struktur kekuasaan lama tanpa segera digantikan oleh struktur yang stabil. Di Indonesia, krisis ini dimulai sejak Jepang menyerah kepada Sekutu pada Agustus 1945. Di banyak daerah, aparat Jepang masih bersenjata, sementara kekuasaan Belanda belum kembali dan Republik baru saja diproklamasikan. Kuntowijoyo menyebut fase ini sebagai periode “dislokasi kekuasaan”, ketika otoritas formal dan legitimasi politik tidak lagi sejalan¹⁵.

Di Pematangsiantar, krisis ini terasa sangat nyata. Aparat Jepang yang sebelumnya menjadi penguasa kota berada dalam posisi

¹³ Kuntowijoyo. 2005, hlm.66-67

¹⁴ Kuntowijoyo. 2005, hlm.66-67

¹⁵ Kuntowijoyo. hlm. 41–44

ambigu: mereka secara resmi kalah perang, tetapi masih mengendalikan senjata dan infrastruktur. Sementara itu, Republik belum memiliki kekuatan militer dan birokrasi yang mapan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi inisiatif lokal, baik dari kaum pemuda, elite lokal, maupun organisasi politik.

Renier menekankan bahwa masa-masa krisis seperti ini adalah momen kunci dalam sejarah karena di situlah berbagai kemungkinan terbuka. Peristiwa-peristiwa kecil di tingkat lokal, perebutan senjata, pengambilalihan gedung, bentrokan jalanan, dapat menentukan arah sejarah secara keseluruhan¹⁶. Dengan kata lain, revolusi di Pematangsiantar tidak dapat dipahami hanya sebagai pantulan dari peristiwa di Jakarta atau Medan. Ia memiliki dinamika sendiri yang lahir dari krisis kekuasaan lokal dan respons masyarakat terhadapnya.

1.1.3. Revolusi sebagai Pengalaman Sosial dan Politik Masyarakat Pematangsiantar

Revolusi bukan hanya pergantian pemerintahan; ia adalah pengalaman sosial yang mengubah cara masyarakat memahami dirinya, negara, dan kekuasaan. Dalam sejarah lokal, perubahan ini sering kali lebih terasa daripada di tingkat pusat. Miftahuddin menekankan bahwa sejarah lokal memungkinkan kita menangkap bagaimana masyarakat biasa mengalami perubahan besar seperti perang, revolusi, dan perubahan rezim¹⁷.

Bagi masyarakat Pematangsiantar, revolusi berarti ketidakpastian, mobilisasi, dan sering kali kekerasan. Hubungan antarkelompok etnis, posisi elite lokal, dan struktur sosial yang diwarisi dari kolonialisme diuji oleh tuntutan baru: kesetiaan pada Republik dan perjuangan mempertahankannya. Dalam konteks ini, kota menjadi laboratorium sosial tempat berbagai identitas dan kepentingan saling berhadapan. Pendekatan sejarah sosial-politik memungkinkan penulis untuk melihat revolusi bukan hanya dari sudut pandang komandan atau pejabat, tetapi juga dari pengalaman warga

¹⁶ Renier, hlm.93-96

¹⁷ Miftahuddin. hlm. 9–12.

kota, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya yang hidup di tengah konflik.

Salah satu tantangan utama dalam menulis sejarah revolusi lokal adalah keterbatasan arsip tertulis. Banyak peristiwa penting di tingkat lokal tidak tercatat dalam dokumen resmi atau hilang dalam kekacauan perang. Oleh karena itu, sejarah lisan menjadi sumber yang sangat penting. *Oral history* memungkinkan sejarawan merekam pengalaman subyektif para pelaku dan saksi sebagai dokumen sejarah primer. Russell menegaskan bahwa tujuan sejarah lisan bukan untuk menafsirkan, melainkan untuk menciptakan sumber primer baru dari ingatan manusia¹⁸.

Dalam konteks Pematangsiantar, kesaksian para pelaku revolusi, yang telah dibukukan, kesaksian keluarga mereka, dan masyarakat lainnya, memungkinkan rekonstruksi peristiwa yang tidak tercatat dalam arsip kolonial atau republik. Sejarah lisan juga membuka akses pada dimensi emosi, motivasi, dan persepsi yang sering tidak tampak dalam dokumen resmi¹⁹. Kombinasi antara arsip tertulis dan sumber lisan menjadikan penulisan sejarah Pematangsiantar lebih kaya dan lebih dekat dengan realitas historis yang dialami masyarakat. Miftahuddin menegaskan bahwa dalam sejarah lokal, tradisi lisan dan kesaksian hidup adalah bagian integral dari sumber sejarah²⁰.

1.2. Jejak dan Sumber Sejarah

Rekonstruksi sejarah Pematangsiantar dalam revolusi kemerdekaan bertumpu pada jejak-jejak yang tersisa: arsip kolonial, dokumen republik, laporan militer, surat kabar sezaman, serta kesaksian para pelaku dan saksi. Dokumen-dokumen tersebut tentu tidak sepenuhnya netral karena ia ditulis dalam konteks kekuasaan tertentu. Oleh karena itu, setiap arsip harus dibaca secara kritis, bukan

¹⁸ Donald A Russell. *Oral History Methodology*. Walnut Creek, CA: AltaMira Press, 2003, hlm 1-2.

¹⁹ Russell, hlm.1-2

²⁰ Miftahuddin, hlm. 63–70

sebagai cermin langsung dari kenyataan, melainkan sebagai representasi yang perlu ditafsirkan. Sejarah, pada akhirnya, adalah upaya menghubungkan jejak-jejak ini menjadi narasi yang koheren.

Setiap karya sejarah tentu harus berangkat dari suatu persoalan historis yang jelas. Dalam konteks revolusi kemerdekaan, persoalan itu bukan hanya “apa yang terjadi”, tetapi “bagaimana dan mengapa kekuasaan kolonial runtuh dan kekuasaan Republik muncul serta dipertahankan.” Kuntowijoyo menegaskan bahwa problem sejarah harus dirumuskan dalam kerangka struktur dan perubahan, bukan sekadar urutan kejadian²¹.

Dalam kaitan dengan Pematangsiantar, persoalan pokoknya adalah bagaimana kota ini bertransformasi dari pusat kolonial menjadi arena revolusi dan kemudian menjadi bagian dari negara Indonesia. Proses ini melibatkan konflik bersenjata, perubahan administrasi, serta pergeseran loyalitas politik masyarakat. Oleh karena itu, karya tulis ini bertanya tentang peristiwa, sekaligus juga tentang makna politik dan sosial dari peristiwa tersebut bagi pembentukan negara Indonesia di Sumatra Timur.

1.3. Pematangsiantar sebagai Subjek Sejarah

Menempatkan Pematangsiantar sebagai subjek berarti melihat kota ini sebagai latar pasif dari peristiwa nasional dan juga sebagai ruang aktif pembentukan negara. Revolusi di kota ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah produk tunggal elite nasional, melainkan hasil dari dinamika yang terjadi di berbagai daerah. Pengalaman lokal memperkaya pemahaman tentang revolusi sebagai proses yang berlapis-lapis: politik, sosial, militer, dan kultural.

Oleh karena itu, karya ini juga berupaya merekonstruksi sejarah Pematangsiantar pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945–1949) sebagai bagian integral dari proses pembentukan negara Indonesia di Sumatra Timur. Secara khusus, analisisnya bermaksud menjelaskan dinamika politik, militer, dan sosial yang membentuk

²¹ Kuntowijoyo. 2003, hlm. 27–31

pengalaman revolusi di Kota Pematangsiantar. Sebagaimana ditegaskan Kuntowijoyo, tujuan sejarah bukan sekadar mengingat masa lalu, tetapi juga dalam rangka memahami makna perubahan sosial dan politik dalam jangka panjang²²

Secara akademik, karya ini memperkaya khasanah historiografi Revolusi Kemerdekaan Indonesia dengan menghadirkan perspektif sejarah lokal yang berbasis sumber primer, arsip, dan sejarah lisan. Secara sosial, karya ini memperkuat memori kolektif masyarakat Pematangsiantar dan Sumatra Timur tentang peran mereka dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dalam hal ini, *oral history* memungkinkan pengalaman pelaku revolusi yang selama ini terpinggirkan untuk masuk ke dalam catatan sejarah resmi²³.

Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat melengkapi narasi besar sejarah nasional, sekaligus juga membuka ruang bagi pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana proses kemerdekaan dijalani, dipertahankan, dan dimaknai di tingkat lokal, seperti Kota Pematangsiantar. Kehadiran data empiris dan kesaksian pelaku sezaman (yang telah dituliskan) memungkinkan rekonstruksi sejarah yang lebih dekat dengan realitas sosial masyarakat pada masa revolusi.

Bagi pemerintah daerah, buku ini dapat memberikan landasan historis yang kuat untuk penguatan identitas daerah dan kebijakan pelestarian warisan sejarah. Informasi mengenai peran Pematangsiantar sebagai pusat perjuangan dan pemerintahan pada masa revolusi dapat dimanfaatkan dalam perencanaan kebudayaan, penetapan cagar budaya, pengembangan wisata sejarah, serta penyusunan narasi resmi sejarah daerah yang berbasis bukti dan tidak sekadar mitos atau ingatan kolektif yang lemah secara dokumenter.

Bagi lembaga pendidikan, khususnya guru-guru sejarah di sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi di Sumatera Utara, buku ini dapat menjadi sumber ajar yang kontekstual dan relevan. Sejarah nasional yang biasanya disampaikan secara abstrak dapat

²² Kuntowijoyo. 2005, hlm. 20–23

²³ Russell, hlm.1-2

diperkaya dengan contoh konkret dari Pematangsiantar dan Sumatra Timur, sehingga siswa dan mahasiswa dapat memahami bahwa kemerdekaan bukan hanya peristiwa di Jakarta atau Yogyakarta, melainkan juga hasil perjuangan masyarakat di daerah mereka sendiri.

Secara khusus, bagi mahasiswa dan siswa, buku ini memberi akses pada sejarah yang lebih dekat dengan lingkungan sosial mereka. Hal ini penting untuk menumbuhkan kesadaran sejarah (*historical consciousness*), rasa memiliki terhadap bangsa dan daerah, serta kemampuan berpikir kritis terhadap sumber dan narasi sejarah. Dengan mempelajari bagaimana masyarakat lokal menghadapi kolonialisme, perang, dan perubahan kekuasaan, generasi muda dapat memahami bahwa sejarah bukan sekadar hafalan, melainkan hasil dari pilihan dan tindakan manusia.

Bagi masyarakat Pematangsiantar, Simalungun, dan Sumatera Utara, buku ini berfungsi sebagai sarana pemulihan dan penguatan memori kolektif. Melalui sejarah lisan dan arsip, pengalaman para pelaku dan saksi revolusi yang selama ini terpinggirkan diangkat kembali ke ruang publik. Hal ini memberi penghargaan terhadap kontribusi generasi terdahulu serta memperkuat identitas lokal sebagai bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

Selain itu, karya tulis ini juga bermanfaat bagi akademisi, peneliti, sejarawan, dan pemerhati kebudayaan, karena menyediakan basis data, narasi, dan interpretasi yang dapat dikembangkan lebih lanjut dalam karya akademik lanjutan, penulisan buku, film dokumenter, maupun program pelestarian sejarah lokal. Dengan demikian, karya ini tidak hanya berhenti sebagai monografi, tetapi menjadi fondasi bagi pengembangan pengetahuan dan kesadaran sejarah yang berkelanjutan.

1.4. Perspektif Sejarah Politik dalam Konteks Lokal

Penulisan buku ini menggunakan pendekatan sejarah politik dan sosial dengan perspektif lokal. Analisisnya bertumpu pada pandangan bahwa negara dan kekuasaan tidak hanya dibentuk di pusat, tetapi juga di daerah-daerah melalui konflik, negosiasi, dan

mobilisasi masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Kuntowijoyo tentang sejarah struktural dan perubahan sosial²⁴.

Dalam historiografi modern, sejarah tidak hanya dipahami sekadar sebagai narasi kejadian, melainkan sebagai proses rekonstruksi ilmiah atas pengalaman manusia di masa lalu. Louis Gottschalk menegaskan bahwa sejarah merupakan hasil interaksi antara fakta yang tersisa dari masa lalu dan interpretasi kritis sejarawan yang berusaha memaknainya. Ia menyebut sejarah sebagai “*the subjective process of re-creation*”, yakni suatu proses intelektual untuk menghidupkan kembali masa lalu berdasarkan bukti yang tersedia²⁵.

Dalam konteks ini, penulisan sejarah Pematangsiantar pada masa Revolusi Kemerdekaan tidak sekadar bertujuan merekam peristiwa, melainkan merekonstruksi dinamika kekuasaan, konflik, dan pengalaman sosial yang membentuk realitas kota tersebut. Dengan demikian, konteksnya berada dalam tradisi sejarah analitis dan interpretatif, bukan sekadar kronik naratif²⁶.

Sementara itu, Sartono Kartodirdjo menekankan bahwa sejarah modern perlu mengintegrasikan pendekatan ilmu-ilmu sosial agar mampu menjelaskan struktur dan proses sosial secara lebih mendalam. Menurutnya, peristiwa sejarah harus dianalisis dalam konteks relasi kekuasaan, konflik kepentingan, dan perubahan sosial yang melingkupinya, bukan sekadar sebagai rangkaian fakta²⁷.

Dengan kerangka ini, Revolusi Kemerdekaan di Pematangsiantar perlu dipahami sebagai peristiwa militer, serta proses sosial-politik yang melibatkan transformasi struktur kolonial, perubahan loyalitas elite lokal, dan mobilisasi rakyat dalam ruang kota. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap bagaimana

²⁴ Kuntowijoyo. 2003, hlm. 40–44

²⁵ Louis Gottschalk. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. 2nd ed. New York: Alfred A. Knopf, 1969, hlm. 46–49.

²⁶ Gottschalk, hlm. 46–47

²⁷ Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1992, hlm.ix–xii

kekuasaan kolonial runtuh dan kekuasaan Republik dibentuk secara konkret di tingkat lokal²⁸.

Pendekatan sejarah politik-sosial yang digunakan juga sejalan dengan pandangan Gottschalk bahwa sejarah berada di antara ilmu sosial dan humaniora. Sejarah harus mematuhi kaidah verifikasi fakta seperti ilmu, dan juga menuntut imajinasi, interpretasi, dan kepekaan terhadap makna seperti seni dan filsafat²⁹.

Penulisan sejarah Kota Pematangsiantar pada masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia (1945–1949) ini bertumpu pada kerangka teoretik sejarah politik dan sosial yang berorientasi pada analisis struktur kekuasaan dan perubahan sosial. Dalam historiografi modern, sejarah merupakan urutan peristiwa sekaligus proses transformasi masyarakat dalam konteks relasi kekuasaan. Kuntowijoyo menegaskan bahwa sejarah harus dianalisis sebagai dinamika struktur dan perubahan, bukan hanya sebagai kronologi politik³⁰.

Pandangan ini diperkuat oleh Sartono Kartodirdjo yang menyatakan bahwa sejarah harus menggunakan pendekatan ilmu sosial agar mampu menjelaskan mekanisme perubahan sosial, konflik, dan integrasi dalam masyarakat. Menurut Sartono, peristiwa sejarah hanya dapat dipahami secara utuh jika ditempatkan dalam struktur sosial yang melahirkannya, seperti sistem ekonomi, stratifikasi sosial, dan relasi kekuasaan³¹.

Dengan kerangka ini, Revolusi Kemerdekaan di Pematangsiantar dipahami sebagai proses disintegrasi struktur kolonial dan pembentukan struktur kekuasaan Republik dalam ruang kota kolonial. Kota tidak hanya dipandang sebagai lokasi geografis, tetapi sebagai ruang sosial dan politik tempat negara dipraktikkan, ditantang, dan dinegosiasikan.

Dalam perspektif Gottschalk, sejarah merupakan rekonstruksi intelektual atas masa lalu yang bertujuan menjelaskan bagaimana dan

²⁸ Kartodirdjo, hlm.ix-xii

²⁹ Gottschalk, hlm. 10–15

³⁰ Kuntowijoyo. 2003, hlm. 40–44

³¹ Kartodirdjo, hlm.ix-xii

mengapa perubahan terjadi. Ia menekankan bahwa sejarah merupakan penceritaan dan analisis rasional terhadap hubungan sebab-akibat dalam perkembangan masyarakat³². Oleh karena itu, pendekatan dalam buku ini bersifat *problem-oriented* dan struktural, yakni menempatkan Pematangsiantar sebagai arena konflik kekuasaan antara kolonialisme yang runtuh dan nasionalisme yang sedang membangun negara.

1.5. Interpretasi, Historiografi dan Alur Pembahasan

Rekonstruksi sejarah Pematangsiantar dalam revolusi kemerdekaan ini bertumpu pada pembacaan kritis terhadap arsip kolonial, dokumen republik, surat kabar sezaman, serta kesaksian para pelaku. Setiap sumber dibaca sebagai produk relasi kekuasaan pada masanya, bukan sebagai cermin netral dari peristiwa.

Alur narasi yang dibangun mengikuti prinsip klasik metode sejarah yang terdiri atas: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Gottschalk menegaskan bahwa inti metode sejarah adalah evaluasi kritis terhadap sumber untuk menentukan keaslian, kredibilitas, dan maknanya sebelum digunakan dalam rekonstruksi naratif³³.

Tahap heuristik mencakup pencarian dan pengumpulan semua sumber yang relevan dengan Revolusi Kemerdekaan di Pematangsiantar, baik berupa arsip era kolonial Belanda, arsip era Jepang, arsip Republik Indonesia, surat kabar, memoar, maupun kesaksian lisan. Gottschalk menekankan bahwa sejarawan harus membedakan antara sumber primer, sekunder, dan turunan serta mengutamakan dokumen yang bersifat kontemporer dengan peristiwa³⁴.

Tahap kritik sumber dilakukan dalam dua bentuk: kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal bertujuan menentukan

³² Gottschalk, hlm. 10-15

³³ Gottschalk, hlm. 27-29; 118-124.

³⁴ Gottschalk, hlm. 52-57; 86-91

keaslian dokumen, apakah dokumen tersebut otentik atau palsu, sedangkan kritik internal menilai kredibilitas isi dokumen, termasuk bias, posisi sosial penulis, dan konteks pembuatannya³⁵. Dalam konteks revolusi lokal, kritik sumber menjadi sangat penting karena banyak dokumen kolonial dan republik ditulis dalam situasi konflik dan propaganda. Oleh karena itu, setiap arsip atau kesaksian harus dibaca sebagai produk relasi kekuasaan tertentu, bukan sebagai cermin netral dari realitas.

Tahap interpretasi merupakan proses menghubungkan fakta-fakta yang telah diverifikasi untuk membangun pemahaman tentang hubungan sebab-akibat, pola perubahan, dan makna sosial peristiwa. Kartodirdjo menekankan bahwa interpretasi harus diarahkan pada penjelasan struktural, yakni bagaimana peristiwa-peristiwa terhubung dengan perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas³⁶. Akhirnya, tahap historiografi adalah penyusunan hasil analisis dan alur dalam bentuk narasi ilmiah yang sistematis. Gottschalk menegaskan bahwa historiografi bukan sekadar menulis ulang data, melainkan menyajikan argumen, interpretasi, dan struktur penjelasan yang koheren agar pembaca dapat memahami dinamika masa lalu secara rasional³⁷. C.R. Kothari menjelaskan bahwa dalam memahami makna, konteks, dan proses sosial, bukan sekadar mengukur variabel numerik. Penulisan sejarah, menurutnya, merupakan bagian dari *qualitative research* karena berfokus pada interpretasi data dokumenter dan pengalaman manusia³⁸.

Dalam penulisan sejarah, data yang dikumpulkan bersifat non-eksperimental dan retrospektif, yakni berasal dari dokumen, arsip, dan ingatan masa lalu. Kothari menyebutnya sebagai *historical research*, yaitu penulisan yang bertujuan menemukan fakta, hubungan sebab-akibat, dan kecenderungan perubahan melalui bukti masa lalu³⁹.

³⁵ Gottschalk, hlm. 118–125

³⁶ Kartodirdjo, hlm. 1–4; 120–124

³⁷ Gottschalk, hlm. 15–19

³⁸ Kothari, C. R. *Research Methodology: Methods and Techniques*. 2nd rev. ed. New Delhi: New Age International, 2004, hlm. 3–7; 31–34

³⁹ Kothari, hlm. 109–113

Buku ini disusun secara kronologis dan tematik. Bab-bab berikutnya akan membahas runtuhnya kekuasaan Jepang, masuknya Proklamasi, konflik awal revolusi, perang kemerdekaan, Agresi Militer Belanda, hingga dampak Konferensi Meja Bundar bagi Pematangsiantar dan Sumatra Timur, serta persepsi media kolonial pada masa revolusi kemerdekaan. Penyusunan ini mengikuti prinsip relevansi dan serialisasi dalam historiografi sebagaimana dirumuskan oleh Renier⁴⁰.

Dengan menempatkan Pematangsiantar sebagai subjek sejarah, buku ini berupaya menunjukkan bahwa revolusi bukan hanya peristiwa nasional, melainkan pengalaman konkret yang membentuk identitas dan memori kolektif masyarakat daerah.

⁴⁰ Renier, hlm. 119–128

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Karya Ilmiah

- Aman. *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945–1998*. Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Amran Zamzami. *Jihad Akbar di Medan Area*. Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Basarsyah, Tuanku Luckman Sinar. *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 2002.
- Bonar, S. K. *Perjuangan Rakjat Tapanuli dan Sumatra Timur*. Sibolga: Djabatan Penerangan Republik Indonesia Provinsi Tapanuli Sumatra Timur, 1950.
- Bloembergen, Marieke; Remco Raben, *Het Koloniale Beschavingsoffensief*. Leiden: Leiden University Press. 2009
- Darsono, dkk. *Berjuang dengan Uang Mempertahankan dan Memajukan Republik Indonesia: Semangat Juang Otoritas dan Masyarakat Sumatera Utara*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2017.
- Dower, John W. *Embracing Defeat: Japan in the Wake of World War II*. New York: W.W. Norton & Company, 1999.
- Edisaputra. *Bedjo Harimau Sumatera Dalam Perjuangan Kemerdekaan*. Jakarta: Yayasan Bina Satria 45, 1985.
- Edisaputra. *Sumatera dalam Perang Kemerdekaan: Perlawanan Rakyat Semesta Menentang Jepang, Inggris dan Belanda*. Jakarta: Yayasan Bina Satria 45, 1987.
- Frank, Richard B. *Downfall: The End of the Imperial Japanese Empire*. New York: Random House, 1999.
- Gottschalk, Louis. *Understanding History: A Primer of Historical Method*. New York: Alfred A. Knopf, 1969.

- Gunawan, Restu, dkk. *Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
- Harahap, Hanif, Dini Ramadhani. *Laskar Revolusioner Sumatera Timur: Dari Revolusi Sosial di Simalungun Sampai Kudeta Gubernur Sumatera*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Harahap, Mohd. Yusuf, dkk. *Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah*. Medan: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 1994.
- Husny, Tengku Haji M. Lah. *Revolusi Sosial di Sumatra Utara / Tapanuli Disertai Pangkal dan Akibatnya*. Medan: Usaha Veteran, 1983.
- Isnaeni, Hendri F. *Romusha: Sejarah yang Terlupakan (1942–1945)*. Yogyakarta: Ombak, 2008.
- Ibrahim, Muhammad. *Mr. Teuku Mohammad Hasan: Karya dan Pengabdian*. Jakarta: Depdikbud, 1983.
- Kahin, George McTuman. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 2003.
- Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Kothari, C. R. *Research Methodology: Methods and Techniques*. New Delhi: New Age International, 2004.
- Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003.
- Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2005.
- Leirissa, R.Z. *PRRI dan Negara Sumatra Timur*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.
- Lubis, Abdul Mukti. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945–1949) Daerah Sumatera Utara*. Medan: Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sumatera Utara, 1980.
- Maeswara, Garda. *Sejarah Revolusi Indonesia 1945–1950*. Yogyakarta: Narasi, 2002.

- Marpaung, S. Y. (Tim). *Sejarah Perang Kemerdekaan di Sumatera 1945–1950*. Medan: Dinas Sejarah Kodam II/Bukit Barisan, 1984.
- Miftahuddin. *Metodologi Penelitian Sejarah Lokal*. Yogyakarta: Ombak, 2019.
- Mook, H. J. van. *Indonesië, Nederland en de Wereld*. Amsterdam/Batavia: De Bezige Bij, 1949.
- Ooi Keat Gin. *The Japanese Occupation of Borneo 1941–1945*. New York: Routledge, 2011.
- Oktorino, Nino. *Konflik Bersejarah: Runtuhnya Hindia Belanda*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Oktorino, Nino. *Konflik Bersejarah: Ensiklopedi Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.
- Piekaar, A.J. *Atjeh en de Oorlog met Japan*. Den Haag. 1949
- Poesponegoro, Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto (Ed.). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Pranoto, Tukidjan. *Tetes Embun di Bumi Simalungun*. Medan: Yayasan Keluarga, 2001.
- Reid, Anthony. *The Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatra*. Oxford: Oxford University Press. 1979.
- Renier, G. J. *History: Its Purpose and Method*. London: George Allen & Unwin, 1950.
- Ricklefs, M. C. *Sejarah Indonesia Modern*. Jakarta: Serambi, 2005.
- Russell, Donald A. *Oral History Methodology*. Walnut Creek: AltaMira Press, 2003.
- Silitonga, Hasoloan. *Kolonel A.E. Kawilarang Komandan Sub Teritorial VII Komando Sumatra*. Medan: Yayasan Pembela Tanah Air, 2000.
- Soewondo, Bambang dkk. 1979/1980. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945–1949) Daerah Sumatera Utara*. Medan: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Takari, Muhammad dkk., *Mr. Teuku Mohammad Hasan: Karya dan Pengabdianya*. Medan: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Sumatera Utara. 1983.
- Takao Fusayama, dkk. *Runtuhnya Imperium Barat di Asia Tenggara: Fajar Asia*. Medan: Prima & Lina Computer Press, 1994.
- Tjahjawulan, Indah & Chusnul Chotimah. *Sang Pembebas dari Utara Masa Pendudukan Jepang di Indonesia*. Jakarta: Kemendikbud, 2019.
- Tjahjawulan, Indah & Chusnul Chotimah. *Sayonara, Saudara Tua: Akhir Pendudukan, Datang Kemerdekaan*. Jakarta: Kemendikbud, 2019.
- Tim Penulis. *Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara*. Medan: Djawatan Penerangan Provinsi Sumatera Utara, 1953.

B. Dokumen, Arsip, dan Laporan Resmi

- In Memoriam Delianorum 1942–1945*. Uitgave van het Oostkust van Sumatra-Instituut, Amsterdam, 1948.
- Koloniaal Verslag 1930.
- Laporan Akhir PT. Delta Sesar Medan. *Proyek Studi Kelayakan Penelusuran Terowongan Siantar Hotel, Jenis dan Potensi Pariwisata di Kota Pematangsiantar serta Kemungkinan Pengembangannya*. Pematangsiantar: Kantor Kebudayaan dan Pariwisata Pemerintah Kota Pematangsiantar. 2003.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIV/2016.
- Secretariaat Generaal van de Ronde Tafel Conferentie.
- Redevoeringen Gehouden ter Gelegenheid van de Plechtige Opening der Ronde Tafel Conferentie*. Den Haag, 23 Agustus 1949.
- Simon van der Harst. *Overzicht van de bestuurshervorming in de Buitengewesten van Nederlandsch-Indië*. Utrecht: A. Oosthoek's Uitgevers-Maatschappij, 1945.

C. Surat Kabar dan Majalah Kolonial

Amigoe de Curacao, Edisi 27 Desember 1943.

Algemeen Handelsblad (berbagai edisi: 1945–1947).

Algemeen Indisch Dagblad De Preangerbode, Edisi 23 Desember 1947.

De Locomotief, Edisi 22 Desember 1947

De Sumatra Post, Edisi 12 September 1946.

De Telegraaf (berbagai edisi: 1946–1947).

De Tijd (berbagai edisi: 1945–1946).

Deventer Dagblad (berbagai edisi: 1946–1947).

Het Nieuwsblad voor Sumatra, Edisi 28 Oktober 1953.

Het Nieuwsblad, Edisi 23 November 1950

Nieuwsblad van het Noorden (berbagai edisi: 1945–1947).

Nieuwe Amsterdamsche Courant – Algemeen Handelsblad, Edisi 29 November 1947.

Nieuwsblad voor Sumatra, Edisi 21 Oktober 1946.

Nieuwe Apeldoornse Courant, Edisi 31 Desember 1947

Twentsch Dagblad Tubantia, Edisi 18 Desember 1947

Tentang Penulis



Prof. Dr. Hisarma Saragih, M.Hum., Dosen Tetap Yayasan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun Pematangsiantar. Lahir pada 9 Januari 1964. Pendidikan yang ditempuh yaitu: 1988 Sarjana (Drs) Jurusan Sejarah Fakultas Sastra USU Medan; 2000 Magister Humaniora (M.Hum) Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada Yogyakarta; 2006 meraih Akta IV Univeritas Simalungun; 2018 Doktor (Dr) Doktor Studi

Pembangunan FISIP USU Medan dengan predikat kelulusan *Cumlaude*.

Pekerjaan sebagai Dosen dimulai sejak 1988 sampai kini, dengan mata kuliah Pada Program Magister yaitu: Pembangunan Berkelanjutan; Kearifan Lokal Simalungun; Metode Penelitian Kualitatif; Selama menjadi dosen Universitas Simalungun telah memangku tugas tambahan Pembantu Dekan III, Sekretaris LPPM, Dekan FKIP, Pembantu Rektor, dan Rektor Universitas Simalungun, Direktur Badan Penjaminan Mutu, dan Direktur Sekolah Pascasarjana periode 2023-2027. Jabatan Fungsional Profesor (Guru Besar) dalam bidang Ilmu Sosial dan Humaniora, diperoleh 1 Desember 2023. Sudah banyak menghasilkan karya ilmiah nasional, dan internasional. Untuk komunikasi dapat menghubungi

Email: hisarmasaragih64@gmail.com ; HP: 081362165907.



Jalatua Habungaran Hasugian, S.Pd., M.H., M.A., merupakan Dosen (DPk) Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Simalungun Pematangsiantar. Lahir di Hutagalung-Parlilitan, 29 Juli 1974. Saat ini tinggal di Kota Pematangsiantar. Menyelesaikan Sarjana Pendidikan dari FKIP Universitas Simalungun Pematangsiantar (2003); Magister Ilmu Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan (2009) dan Magister Ilmu Sejarah dari FIB Universitas Sumatera Utara (USU) Medan (2015).

Sejak mahasiswa telah aktif sebagai Jurnalis di Jawa Pos Group (Harian Radar Nauli, Sumut Pos dan Posmetro Siantar); Tahun 2006 – 2014 sebagai Guru Sejarah di SMA Negeri 3 Kota Pematangsiantar; 2015 – 2017 beralih sebagai Plt. Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kota Pematangsiantar; 2017 – 2022 menjadi Kepala Seksi Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar. Selain itu, sejak 2006 – 2020 sebagai Dosen *part time* pada Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Simalungun; 2009-2014 sebagai Tutor pada Universitas Terbuka UPPJJ-Medan; 2020 – 2022 sebagai Dosen Tetap Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Simalungun dengan Perjanjian (NIDK) dan sejak 1 April 2022 menjadi Dosen Tetap Diperbantukan (DPk) pada Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Simalungun. Saat ini juga aktif sebagai Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Pematangsiantar. Penulis telah menghasilkan sejumlah karya ilmiah, baik bentuk jurnal maupun buku-buku sejarah.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	: EC002026042335, 27 Maret 2026
Pencipta	
Nama	: Prof. Dr. Hisarma Saragih, M.Hum dan Jalatua H. Hasugian, M.H., M.A.
Alamat	: Jl. Handayani Gg. Bersatua Kanan no 17, Kel. Bah Kapul, Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, 21139
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Prof. Dr. Hisarma Saragih, M.Hum dan Jalatua H. Hasugian, M.H., M.A.
Alamat	: Jl. Handayani Gg. Bersatua Kanan no 17, Kel. Bah Kapul, Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara, 21139
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Buku
Judul Ciptaan	: MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN DI PEMATANGSIANTAR 1945-1949
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 27 Maret 2026, di Kota Adm. Jakarta Pusat
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	: 001178621

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
 Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM
 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
 u.b.
 Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH., MH.
 NIP. 196912261994031001



Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah diisgal secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

Revolusi Kemerdekaan Indonesia tidak hanya berlangsung di pusat-pusat kekuasaan nasional, tetapi juga bergelora kuat di berbagai daerah, termasuk Pematangsiantar. Kota ini menjadi ruang penting pertemuan antara warisan kolonial, mobilisasi rakyat, serta dinamika politik dan militer pada masa transisi menuju kemerdekaan.

Buku *Masa Revolusi Kemerdekaan di Pematangsiantar 1945–1949* mengkaji secara mendalam proses perubahan sosial, politik, dan keamanan yang terjadi setelah Proklamasi 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Melalui pendekatan sejarah kritis dan penggunaan beragam sumber arsip, dokumen sezaman, serta kesaksian historis, buku ini merekonstruksi peran aktor-aktor lokal, gerakan rakyat, konflik kekuasaan, dan strategi perjuangan yang membentuk wajah revolusi di tingkat daerah.

Aksi heroisme Pengibaran Bendera Merah Putih, pertempuran Siantar Hotel hingga perebutan Gedung Juang 45 merupakan simbol perjuangan rakyat menjadi representasi nyata bagaimana revolusi dimaknai sebagai perjuangan kolektif masyarakat Pematangsiantar dalam menghadapi kekuatan kolonial yang berusaha kembali berkuasa. Dengan perspektif sejarah lokal yang terhubung pada konteks nasional, buku ini memperlihatkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan bersama dari berbagai ruang sosial di Nusantara.

Buku ini penting bagi akademisi, mahasiswa, peneliti sejarah, serta masyarakat luas yang ingin memahami dinamika Revolusi Kemerdekaan Indonesia dari sudut pandang lokal yang kaya makna dan kontribusi historis. (*)



PENERBIT KBM INDONESIA
Anggota IKAPI
0813 5751 7526 / 0353 3234 874
Kantor : Maguwoharjo, Depok, Sleman-Yogyakarta
@penerbitbukujogja
@penerbit.kbm

ISBN 978-634-278-246-0

